Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam
Vol. 12, no.2 (Agustus 2026)

Dakwah Pesantren dalam Menghadapi Disinformasi Keagamaan: Negosiasi Otoritas Pesantren dan Pembentukan Moderasi Beragama

Pesantren's Da'wah in Confronting Religious Disinformation: The Negotiation of Pesantren Authority and the Shaping of Religious Moderation

Fazlul Rahman
UPN "Veteran" Jawa Timur
fazlul.rahman.ilkom@upnjatim.ac.id

Muhammad Zakir Husain
Universiti Islam Sultan Sharif Ali Negara Brunei Darussalam
zakir.husain@unissa.edu.bn

Abstract
This study examines how a traditional Indonesian Pesantren asserts its religious authority as a counter-narrative to media-driven misinformation, and how this contestation shapes the construction of religious moderation among *santri*. Data were drawn from an in-depth interview with a senior *Kiai* and a focus group discussion with *santri* at Pesantren Aswaja Nusantara, Mlangi, Yogyakarta, an NU-affiliated Pesantren known for its inclusive religious orientation. Data were analyzed thematically through the lens of mediatization of religion, examining how Pesantren authority is discursively positioned against non-institutional and media sources of religious knowledge. The *Kiai* frames the Pesantren's role in interfaith engagement partly as a corrective measure: *santri* and outsiders alike should encounter Islam through direct, first-hand religious authority rather than through irresponsible media narratives or individuals with limited religious literacy. This positions the Pesantren not only as an educational institution but as a competing node of religious legitimacy in an increasingly mediatized public sphere. *Santri* narratives corroborate this dynamic, describing how structured religious learning within the Pesantren—particularly *fiqh*-based reasoning—cultivates openness in ways that unmediated, fragmented information cannot. This study extends the mediatization-of-religion framework to the Pesantren context, an institution rarely examined through this lens, and demonstrates how traditional religious authority actively repositions itself amid digital information disorder. Findings inform strategies for religious institutions and policymakers seeking to strengthen credible religious authority as a counterweight to online religious misinformation.
Keywords: mediatization of religion; religious authority; Pesantren; religious moderation; misinformation

Abstrak
Penelitian ini mengkaji bagaimana sebuah pesantren tradisionalis di Indonesia menegaskan otoritas keagamaannya sebagai narasi tandingan terhadap disinformasi yang disebarkan media, serta bagaimana perlawanan ini membentuk konstruksi moderasi keagamaan di kalangan santri. Data diperoleh dari wawancara mendalam dengan seorang kiai senior dan diskusi kelompok terfokus bersama para santri di Pesantren Aswaja Nusantara, Mlangi, Yogyakarta, sebuah pesantren yang

berafiliasi dengan NU dan dikenal karena orientasi keagamaannya yang inklusif. Data dianalisis secara tematis melalui lensa mediatisasi agama, dengan menelaah bagaimana otoritas pesantren diposisikan secara diskursif melawan sumber-sumber pengetahuan agama non-institusional dan media. Kiai tersebut memandang peran pesantren dalam dialog antaragama sebagian sebagai langkah korektif: baik santri maupun pihak luar seharusnya mengenal Islam melalui otoritas keagamaan langsung dan pertama tangan, bukan melalui narasi media yang tidak bertanggung jawab atau individu dengan literasi keagamaan yang terbatas. Hal ini menempatkan pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat legitimasi keagamaan yang bersaing di ruang publik yang semakin dimediasikan. Narasi para santri menguatkan dinamika ini, dengan menggambarkan bagaimana pembelajaran keagamaan yang terstruktur di dalam pesantren—terutama penalaran berbasis fiqh—menumbuhkan keterbukaan dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh informasi yang tidak dimediasi dan terfragmentasi. Penelitian ini memperluas kerangka kerja mediatisasi agama ke dalam konteks pesantren—sebuah lembaga yang jarang diteliti melalui sudut pandang ini—serta menunjukkan bagaimana otoritas agama tradisional secara aktif menyesuaikan posisinya di tengah kekacauan informasi digital. Temuan-temuan ini memberikan masukan bagi strategi yang dapat diterapkan oleh lembaga-lembaga agama dan pembuat kebijakan yang berupaya memperkuat otoritas agama yang kredibel sebagai penyeimbang terhadap disinformasi agama daring.
Kata kunci: mediatisasi agama; otoritas agama; pesantren; moderasi beragama; misinformasi

Pendahuluan

Intoleransi beragama di Indonesia tetap menjadi masalah yang terus berlanjut dan, berdasarkan beberapa indikator, semakin memburuk. Setara Institute mencatat 329 insiden pelanggaran kebebasan beragama pada tahun 2024, naik dari 217 insiden pada tahun 2023, dengan pihak-pihak pemerintah—termasuk pemerintah daerah, kepolisian, dan lembaga pendidikan—bertanggung jawab atas hampir 40 persen dari kasus-kasus tersebut (*Setara* 2024). Ancaman ini juga telah merambah ke dunia maya: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengidentifikasi lebih dari 2.000 akun media sosial yang menyebarkan lebih dari 10.000 konten intoleran hanya antara Januari dan Oktober 2024 (Abdushomad 2025), yang mencerminkan pergeseran strategis dari kekerasan fisik menuju penyebaran "halus" ideologi radikal melalui media digital, dengan kaum muda yang semakin menjadi sasaran. Yang mengkhawatirkan, data BNPT menunjukkan bahwa 22,4 persen siswa SMA di Indonesia menunjukkan intoleransi pasif dan 5 persen lainnya menunjukkan sikap intoleransi aktif (Kumparan 2024)—menandakan bahwa pertarungan seputar penafsiran makna agama tidak lagi terbatas pada institusi fisik seperti pesantren, masjid, atau sekolah, tetapi semakin berlangsung di ruang digital, di mana otoritas bersifat tersebar, tidak terverifikasi, dan sulit diatur.

Pergeseran ini mencerminkan transformasi yang lebih luas dalam cara pengetahuan keagamaan diproduksi, disebarluaskan, dan dilegitimasi di Indonesia (Solahudin and Fakhruroji 2019; Raya 2024; Hannan and Mursyidi 2023; Adlan 2023). Data survei regional terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 65 persen responden dalam survei potensi radikalisme agama berasal dari Generasi Z dan milenial dengan tingkat penetrasi internet yang tinggi, dan 68 persen di antaranya secara aktif mencari konten keagamaan secara daring, terutama melalui YouTube dan TikTok; untuk pola yang lebih luas, berbagai studi yang ada secara konsisten menunjukkan bahwa umat Muslim Indonesia yang lebih muda merupakan pengguna internet paling aktif dan sangat terpapar pada pembelajaran keagamaan daring serta konten radikal (Hefner 2022). Para pengamat mencatat bahwa hal ini menjadikan ruang digital bukan lagi sekadar media komunikasi, melainkan arena utama di mana pemikiran dan sikap keagamaan terbentuk, dengan algoritma media sosial menciptakan ruang gema yang berisiko memperkuat intoleransi jika dibiarkan tidak seimbang (Adlan 2023; La Harisi et al. 2026; Zabieno et al. 2025). Dalam lingkungan ini, pemegang otoritas keagamaan tradisional—Kiai, ulama, dan Pesantren—menghadapi tantangan struktural: otoritas

pedagogis tatap muka yang secara historis melekat pada mereka kini harus bersaing dengan narasi keagamaan yang diperkuat oleh algoritma dan seringkali tidak dapat dipertanggungjawabkan yang beredar secara daring (Ichwan et al. 2025; Lubis 2023; Syafaq et al. 2026).

Terlepas dari urgensi ini, literatur akademis mengenai agama digital di Indonesia cenderung berfokus pada dua ekstrem: di satu sisi, analisis tingkat makro mengenai radikalisasi daring dan perekrutan ekstremis; dan di sisi lain, studi mengenai "da'i digital" (ustaz seleb) perkotaan yang mahir teknologi (Sugihartati et al. 2020; Raya 2024). Yang relatif belum banyak diteliti adalah bagaimana pesantren tradisional berbasis pedesaan—lembaga yang otoritasnya secara historis bertumpu pada kehadiran fisik bersama, sanad, dan pedagogi komunal—memposisikan dan melegitimasi diri mereka secara diskursif melawan kekacauan media yang justru mengancam otoritas mereka (Harnadi et al. 2021b; Rosowulan et al. 2025). Kajian yang ada mengenai "Islam daring" di Indonesia berisiko menyederhanakan dinamika ini, dengan memperlakukan pertarungan keagamaan di ranah digital sebagai pertarungan antara pembuat konten moderat dan ekstremis, sementara mengabaikan bagaimana otoritas kelembagaan yang mapan seperti pesantren secara aktif membangun narasi tandingan yang menegaskan legitimasi epistemik mereka sebagai sumber pengetahuan keagamaan "tangan-pertama", yang secara eksplisit bertolak belakang dengan apa yang mereka gambarkan sebagai media yang tidak bertanggung jawab dan suara-suara publik yang kurang kompeten dalam hal keagamaan (Lubis 2023; Saepudin and Rohandy 2024; Hefner 2022).

Kesenjangan ini secara teoritis cukup signifikan. Kerangka kerja mediatisasi agama (Hjarvard 2008; Campbell and Tsuria 2021) argues that as religious institutions increasingly operate within and through media logics, their berpendapat bahwa seiring dengan semakin banyaknya lembaga keagamaan yang beroperasi di dalam dan melalui logika media, otoritas mereka tidak sekadar berkurang, melainkan dinegosiasikan ulang—para aktor keagamaan menyesuaikan strategi komunikatif untuk mempertahankan legitimasi di dalam ranah publik yang telah dimediatisasi. Namun, kerangka kerja ini sebagian besar dikembangkan melalui studi kasus aktor-aktor keagamaan yang tumbuh di era digital atau yang reformis; penerapannya pada pesantren tradisionalis yang berafiliasi dengan NU—sebuah lembaga yang model otoritasnya, pada prinsipnya, merupakan antitesis dari otoritas keagamaan yang dimediasikan dan terlepas dari konteks—jarang diuji.

Penelitian ini membahas kesenjangan tersebut dengan mengkaji Pesantren Aswaja Nusantara di Mlangi, Yogyakarta, sebuah pesantren yang berafiliasi dengan NU dan dikenal karena orientasi keagamaannya yang inklusif serta keterlibatannya yang aktif dalam dialog antaragama. Berdasarkan wawancara mendalam dengan seorang kiai senior dan diskusi kelompok terfokus dengan para santri, penelitian ini mengajukan pertanyaan: bagaimana pesantren ini secara diskursif memposisikan otoritas keagamaannya dalam kaitannya dengan disinformasi keagamaan yang didorong oleh media, dan bagaimana posisi ini membentuk cara moderasi keagamaan dibangun dan ditransmisikan kepada para santri? Dengan demikian, penelitian ini menguji apakah kerangka kerja mediatisasi agama—yang sebagian besar dikembangkan di luar konteks pesantren—dapat menjelaskan bagaimana sebuah lembaga tradisionalis menegaskan kembali, alih-alih sekadar kehilangan, otoritasnya di tengah semakin dalamnya kekacauan keagamaan digital di Indonesia. Temuan-temuan ini memberikan perspektif yang berakar pada realitas lapangan dan berorientasi pada institusi bagi studi-studi mengenai moderasi keagamaan, komunikasi, dan otoritas di Global Selatan, di mana masa depan pluralisme mungkin lebih bergantung pada apakah suara-suara institusional yang dipercaya masih dapat terdengar di atas konten-konten ekstremis daripada sekadar mengalahkan konten-konten tersebut.

Kajian Literatur

Sanad, Otoritas Epistemik Klasik dan Transformasi Algoritmik

Dalam tradisi keilmuan Islam klasik, sanad berfungsi sebagai mekanisme transmisi, verifikasi, dan legitimasi yang menjamin kesinambungan otoritas keilmuan (Syarifuddin 2026; Harto 2026) . Sanad tidak sekadar rantai periwayatan, melainkan sistem epistemik yang mengintegrasikan transmisi lisan, otoritas ulama, dan jaringan keilmuan global yang berpusat di Haramain. Tradisi pesantren mempertahankan model transmisi pengetahuan berbasis Kitab Kuning, di mana otoritas guru berakar pada legitimasi transmisi melalui sanad yang berfungsi sebagai jangkar epistemik untuk otentisitas dan kesinambungan ilmu (Didin et al. 2026)

Praktik pemberian ijazah sanad menyalurkan ilmu secara hierarki dari guru ke murid hingga ke pengarang kitab dan Rasulullah, menegaskan urgensi sanad bagi keilmuan dalam transmisi pengetahuan agama (Mustaghfirin and Muhammad 2021). Jaringan sanad keilmuan ulama Nusantara, seperti yang dipetakan melalui sanad KH Munawwar Sidayu di Gresik, menunjukkan bahwa sanad berfungsi sebagai saluran legitimasi epistemik dan moral, di mana hubungan kekerabanan kiai dan kolaborasi dengan alumni menciptakan sistem otoritas ilmiah yang terstruktur dan berkelanjutan (Hidayati 2025). Sanad juga berperan sebagai fondasi epistemologi pendidikan Islam yang menjaga integritas pengetahuan sembari menempatkan ulama Nusantara dalam jaringan intelektual global Islam.

Dalam perjalanannya, otoritas ulama telah berubah dari sistem epistemik berbasis sanad menuju bentuk legitimasi yang semakin didasarkan pada algoritma digital, di mana legitimasi keilmuan tidak lagi semata-mata berasal dari transmisi pengetahuan tradisional melainkan juga dipengaruhi oleh daya tarik emosional dan visibilitas platform. Digitalisasi mempercepat disintermediasi otoritas keagamaan dengan mengutamakan popularitas, resonansi emosional, dan metrik keterlibatan alih-alih keketatan metodologis dan validasi ilmiah (Siregar et al. 2025) . Visibilitas, keterlibatan pengguna, dan sistem rekomendasi algoritmik semakin menentukan siapa yang memperoleh pengaruh dalam sphere publik keagamaan kontemporer. Otoritas keagamaan kontemporer bukan monolitik melainkan negosiasi hibrida dari tiga dimensi yang berpotongan: otoritas berbasis pengetahuan *(scholarship tradisional)*, otoritas berbasis karisma (kesalehan performatif), dan otoritas berbasis platform (visibilitas algoritmik dan metrik keterlibatan). Konsep "otoritas berplatformisasi" ini mengungkap bagaimana logika platform mengomodifikasi teologi dan membentuk enklave algoritmik (Sulfikar and Yasmine 2026). Munculnya pendakwah selebritas digital telah menggeser otoritas tradisional yang dibangun ulama dan pesantren dari transmisi tekstual ke transmisi media digital (Raya 2024)

Mediatisasi dan Negosiasi Institusional Pesantren

Mediatisasi agama menjelaskan perubahan mendasar dalam cara otoritas keagamaan diproduksi, disebarkan, dan diterima di ruang publik. Jika sebelumnya pesan keagamaan terutama memperoleh legitimasi melalui institusi, sanad keilmuan, dan relasi tatap muka antara ulama dan jamaah, kini media digital menjadi arena utama pembentukan pengetahuan agama. Informasi keagamaan tidak hanya dipublikasikan melalui platform digital, tetapi juga dibentuk ulang mengikuti logika media yang menekankan visibilitas algoritmik, keterlibatan audiens, dan performativitas komunikator (Syarifuddin 2026; Hayati et al. 2025). Konsekuensinya, otoritas keagamaan mengalami desentralisasi: siapa pun yang mampu membangun perhatian publik dapat memperoleh pengaruh religius, meskipun tidak selalu memiliki legitimasi keilmuan yang kuat. Demokratisasi ini membuka akses yang lebih luas terhadap wacana Islam, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan berupa misinformasi, polarisasi ideologis, serta melemahnya mekanisme pengawasan ilmiah terhadap pengetahuan agama ('Ulyan 2023).

Dalam konteks tersebut, pesantren menghadapi proses negosiasi institusional antara mempertahankan otoritas tradisional dan beradaptasi dengan ekosistem digital. Tegangan epistemik muncul ketika logika hierarkis sanad berhadapan dengan logika algoritma yang

mendistribusikan legitimasi melalui popularitas, sehingga melahirkan figur-figur baru seperti influencer dakwah dan bahkan AI Mufti yang memperoleh kredibilitas dari performa digital (Rois and Yazdani 2026). Namun, perubahan ini tidak berarti algoritma sepenuhnya menggantikan sanad. Pengalaman berbagai institusi, seperti Al-Azhar, Dar al-Ifta', maupun MUI, menunjukkan bahwa strategi yang lebih efektif adalah menggabungkan legitimasi akademik dengan kehadiran digital yang responsif (Muhammad Latif Fauzi et al. 2026; Zayyadi et al. 2025). Dengan demikian, transformasi otoritas keagamaan lebih tepat dipahami sebagai proses hibridisasi, yakni pertemuan antara legitimasi normatif-transmisif yang berakar pada tradisi pesantren dan legitimasi performatif-distributif yang dibentuk oleh media digital, sementara audiens tetap menempatkan pembelajaran tatap muka sebagai rujukan utama untuk memverifikasi kredibilitas keagamaan (Whyte 2022)

Otoritas Keagamaan Digital dalam Konteks Pesantren di Indonesia

Khususnya di Indonesia, sejumlah literatur yang mulai berkembang mengkaji bagaimana pesantren dan kiai merespons lingkungan yang dimediasikan ini. Otoritas keagamaan tradisional—ulama, kiai, ustadz—semakin harus berbagi otoritas mereka dengan suara-suara keagamaan baru yang secara efektif memanfaatkan YouTube, podcast, dan media sosial, sebuah fenomena yang dipelajari melalui lensa pergeseran otoritas keagamaan di ranah keagamaan digital Indonesia (Raya 2024; Setianto 2026; Najiha 2025).

Alih-alih berasumsi bahwa otoritas pesantren sekadar terkikis di bawah tekanan ini, beberapa studi mendokumentasikan strategi adaptif dan defensif. Sebuah studi menemukan bahwa otoritas seorang kiai tetap bertahan karena pesantren berfungsi sebagai ruang untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya, termasuk pengakuan sosial terhadap posisi terhormat sang kiai, bahkan di tengah maraknya otoritas keagamaan digital baru (Harnadi et al. 2021b). Demikian pula, pesantren terbukti merespons digitalisasi bukan melalui penolakan total, melainkan dengan mengembangkan bentuk-bentuk otoritas hibrida yang mengintegrasikan legitimasi keilmuan tradisional yang berakar pada turāth dan rantai transmisi dengan keterlibatan digital yang aktif, sehingga memungkinkan mereka mempertahankan relevansi di tengah lanskap keagamaan digital yang plural dan kompetitif (Sulthon et al. 2025). Literatur ini menegaskan bahwa otoritas pesantren di era digital paling baik dipahami sebagai sesuatu yang dinegosiasikan secara aktif, bukan hilang secara pasif—sebuah premis yang diperluas oleh penelitian ini dengan mengkaji strategi diskursif spesifik dalam memposisikan pengetahuan pesantren sebagai kebenaran yang terverifikasi dan diperoleh langsung, sebagai lawan dari narasi media yang "tidak bertanggung jawab".

Moderasi Beragama sebagai Konsep yang Diperdebatkan dan Terus Berkembang

Konsep terakhir yang diadopsi dalam penelitian ini adalah "moderasi beragama" itu sendiri, yang dalam wacana kebijakan dan akademis terkini di Indonesia semakin dipandang bukan sebagai gagasan toleransi yang kaku dan sempit, melainkan sebagai konstruksi multidimensi yang mencakup pengakuan, representasi, dan keadilan distributif di antara kelompok-kelompok agama—sebuah definisi yang sejalan dengan cara para kiai dalam penelitian ini memandang moderasi sebagai hal yang tak terpisahkan dari keadilan sosial-ekonomi dan politik yang lebih luas (Mukhibat et al. 2024).

Memposisikan moderasi dengan cara ini membantu membedakan penelitian ini dari karya-karya yang memandang moderasi terutama sebagai hasil sikap, seperti toleransi atau anti-radikalisme. Dalam konteks pesantren, beberapa penelitian terbaru justru menunjukkan bahwa moderasi ditumbuhkan melalui otoritas pedagogis, teladan, tata kelola literasi digital, dan strategi kepemimpinan hibrida (Hendi Sugianto et al. 2025), atau melalui tradisi ritual dan berbasis kitab yang membentuk habitus keagamaan yang inklusif dan kontekstual sekaligus menentang dakwah digital yang memecah belah (Saepudin and Rohandy 2024).

Ketiga aliran pemikiran sebelumnya—(1) otoritas keagamaan berbasis sanad versus algoritmik, (2) teori mediatisasi kelembagaan, dan (3) rekonseptualisasi moderasi keagamaan di luar sekadar

toleransi—bertemu pada sebuah pertanyaan analitis bersama yang belum sepenuhnya diangkat oleh studi-studi yang ada: bagaimana sebuah pesantren tradisionalis secara komunikatif menegaskan otoritas epistemiknya melawan disinformasi yang didorong oleh media, dan bagaimana penegasan ini, pada gilirannya, membentuk isi substantif dari moderasi yang ingin ditumbuhkannya di kalangan santri? Studi-studi sebelumnya mengenai pesantren dan otoritas digital (misalnya, karya Rahman tentang kiai dan negosiasi otoritas yang dimediasikan; studi tentang otoritas keilmuan hibrida di pesantren yang terdigitalisasi (Rahman 2015)) menunjukkan bahwa negosiasi memang terjadi, namun jarang menghubungkan negosiasi ini secara eksplisit dengan isi moderasi keagamaan yang disampaikan. Kerangka konseptual penelitian ini—membaca klaim otoritas Kiai melalui lensa mediatisasi kelembagaan, dan membaca narasi santri melalui transmisi konsep moderasi yang diperluas dengan keadilan—dirancang secara khusus untuk menjembatani hubungan tersebut, tanpa meluas ke konsep-konsep (misalnya, desain sistem rekomendasi algoritmik, ekonomi platform) yang berada di luar cakupan komunikatif dan pedagogis data penelitian ini.

Metode

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus kualitatif untuk mengkaji bagaimana pesantren tradisionalis di Indonesia secara diskursif membangun otoritas keagamaan dan moderasi keagamaan sebagai respons terhadap disinformasi yang dipicu oleh media. Desain studi kasus dipilih karena fenomena yang diteliti—negosiasi otoritas keagamaan kelembagaan dalam ranah publik yang semakin dimediasikan—terikat pada konteks dan paling baik dipahami melalui makna-makna kontekstual yang dilekatkan oleh para peserta sendiri, bukan melalui variabel-variabel yang diabstraksikan dari lingkungan kelembagaan dan komunal mereka. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka konseptual penelitian ini, yang memandang otoritas dan moderasi sebagai sesuatu yang dibangun secara diskursif, bukan sebagai atribut tetap yang dapat diukur secara terpisah dari konteksnya.

Penelitian ini dilakukan di Pesantren Aswaja Nusantara di Mlangi, Yogyakarta, sebuah pesantren yang berafiliasi dengan NU dan terletak di tengah-tengah komunitas yang mayoritas penduduknya adalah santri, dengan tradisi pembelajaran Islam yang telah berlangsung selama beberapa generasi. Lokasi ini dipilih secara sengaja karena tiga alasan yang saling terkait. Pertama, pesantren ini secara eksplisit memposisikan moderasi beragama sebagai bagian dari identitas pedagogisnya, sehingga menjadikannya tempat strategis di mana konstruksi otoritas dan transmisi moderasi dapat diamati secara bersamaan, alih-alih diperlakukan sebagai fenomena yang terpisah. Kedua, pesantren ini memiliki sejarah yang tercatat dalam keterlibatan antaragama—termasuk menjadi tuan rumah kunjungan siswa antaragama dan berpartisipasi dalam forum-forum nasional terkait moderasi seperti yang diselenggarakan oleh Institut Maarif dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Yogyakarta—yang menunjukkan bahwa sikapnya terhadap moderasi tertanam secara kelembagaan, bukan sekadar secara individual. Ketiga, lokasi ini memberikan akses terhadap perspektif elit dan akar rumput dalam satu struktur kelembagaan, sehingga penelitian ini dapat mengkaji bagaimana otoritas keagamaan dan moderasi diartikulasikan dari dua sudut pandang yang berbeda secara struktural dalam komunitas yang sama.

Data diperoleh melalui dua metode yang saling melengkapi, yang dirancang untuk menangkap kedua sudut pandang tersebut. Wawancara mendalam dilakukan dengan seorang kiai senior di pesantren tersebut, yang memegang posisi otoritas kelembagaan dan keilmuan serta secara langsung bertanggung jawab dalam mengartikulasikan filosofi Aswaja Nusantara pesantren tersebut serta sikapnya terhadap moderasi beragama; wawancara tersebut mengikuti protokol semi-terstruktur yang mencakup keunikan pesantren, alasan pesantren dalam berinteraksi dengan pengunjung non-Muslim, konseptualisasi pesantren mengenai moderasi, ancaman yang dirasakan terhadap moderasi, serta pandangannya mengenai masa depan hubungan antaragama. Hal ini dilengkapi dengan diskusi kelompok terfokus bersama para santri yang tinggal di pesantren, yang lamanya tinggal berkisar antara tiga bulan hingga lebih dari empat tahun dan motivasi mereka

untuk masuk pesantren pun beragam—mulai dari arahan orang tua, keinginan untuk menghindari kesepian, hingga minat terhadap kehidupan keagamaan komunal. Variasi dalam lamanya tinggal dan motivasi ini disengaja, karena hal ini memungkinkan penelitian ini menangkap narasi para santri pada berbagai tahap sosialisasi ke dalam pedagogi pesantren yang berkaitan dengan moderasi, alih-alih mengasumsikan satu hasil yang seragam. Kedua instrumen tersebut dirancang untuk menggali kerangka pemikiran para peserta sendiri mengenai otoritas keagamaan, media, dan moderasi, sejalan dengan fokus penelitian ini pada wacana, bukan sekadar perilaku.

Desain penelitian, di sisi lain, memiliki keterbatasan yang perlu diakui. Sebagai studi di satu lokasi yang didasarkan pada satu wawancara dan satu diskusi kelompok terfokus, temuan-temuannya tidak dimaksudkan untuk dapat digeneralisasikan secara statistik ke seluruh pesantren di Indonesia; sebaliknya, penelitian ini mengupayakan generalisasi teoretis, dengan tujuan memperluas kerangka mediatisasi agama ke dalam konteks kelembagaan—yaitu pesantren tradisionalis yang berafiliasi dengan NU—di mana kerangka tersebut jarang diterapkan, alih-alih mengklaim representativitas. Pertimbangan etis juga diperhatikan sepanjang proses penelitian, termasuk persetujuan yang didasarkan pada informasi lengkap dari semua peserta sebelum pengumpulan data; jika diperlukan untuk publikasi, identitas santri dianonimkan menggunakan kode peserta alih-alih nama pribadi untuk melindungi privasi mereka.

Temuan

Peran Pesantren sebagai Penyeimbang Disinformasi Keagamaan yang Dipicu Media

Data menunjukkan bahwa keterlibatan pesantren dengan pengunjung non-Muslim serta upaya penjangkauan antaragama yang lebih luas tidak dipandang oleh para kiai sebagai keramahan yang bersifat insidental, melainkan sebagai strategi epistemik yang disengaja (Ubaidillah and Faiz 2025; Negara et al. 2025; Afida et al. 2024). Kiai mendasarkan upaya penjangkauan ini pada identitas ganda pesantren, dengan menjelaskan bahwa: *"Pesantren selain wadah tafaqquh fiddin, juga sebagai lembaga dakwah*", yang sejalan dengan temuan bahwa pesantren berfungsi secara bersamaan sebagai pusat pendidikan agama, penyebar nilai-nilai moderat, dan agen sosial yang membentuk sikap masyarakat yang lebih luas (Setiawan et al. 2026).

Lebih penting lagi, ia secara eksplisit membenarkan keterlibatan langsung dengan pihak luar sebagai upaya korektif terhadap sumber-sumber pengetahuan agama yang tidak dapat diandalkan, dengan menyatakan bahwa tujuannya adalah agar orang-orang dapat *"mengetahui Islam dari fakta langsung, bukan dari non-Muslim, media yang tidak bertanggung jawab, atau orang-orang yang kurang memahami agama"*. Ungkapan ini—"tangan pertama"—menempatkan pengetahuan yang diwujudkan dan diverifikasi secara kelembagaan sebagai lawan langsung dari sirkulasi informasi yang dimediasi dan tidak terverifikasi, sehingga memperkuat klaim pesantren atas otoritas epistemik terhadap narasi-narasi digital atau media yang bersaing.

Merekonstruksi Moderasi sebagai Keadilan, Bukan Sekadar Toleransi

Temuan utama kedua berkaitan dengan bagaimana Kiai mendefinisikan ulang moderasi beragama itu sendiri. Alih-alih menerima definisi sempit yang terbatas pada toleransi, ia secara eksplisit memperluas konsep tersebut: "Rekognisi (mengakui keberadaan seluruh agama), Representasi (kelompok identitas, minoritas, dalam berbagai ruang sosial dan politik, harus ada kehadiran afirmatif), Distribusi (mayoritas secara kuantitas, tetapi minoritas dalam hal sumber daya ekonomi). Jadi tidak ada perdamaian tanpa keadilan (keadilan dalam konsep apa pun)" Kerangka kerja yang diperluas ini berakar secara lokal pada nilai-nilai *"Tawazun, tasamuh, I'tidal"* (keseimbangan, toleransi, keteguhan), yang oleh Kiai dijelaskan sebagai nilai-nilai yang tertanam secara implisit, bukan diajarkan secara eksplisit: *"Materi moderasi menjadi kurikulum tersembunyi; upaya tasamuh berfungsi sebagai toleransi."*

Penalaran Berbasis Fiqh sebagai Jalan Santri Menuju Keterbukaan

Data dari diskusi kelompok terfokus menguatkan transmisi implisit ini di kalangan santri. Seorang santri menggambarkan perubahan eksplisit sebelum dan sesudah: *"Awalnya saya memandang Islam hanyalah agama yang paling benar dan tidak ada toleransi; setelah bergabung dengan Aswaja, yang banyak mengadakan kegiatan-kegiatan moderasi, pandangan saya pun berubah."* Para santri secara konsisten mengaitkan perubahan ini dengan metode pedagogis khas pesantren, dengan penjelasan sebagai berikut: *"Di pesantren, sangat khas dengan penjelasan fiqih. Dengan membahas fiqih, kita terbiasa dengan perbedaan. Pembelajaran ini kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari."*

Kondisi Kelembagaan dan Sosial yang Menopang Otoritas

Di luar isi doktrinal, kedua sumber data tersebut menunjukkan adanya kondisi struktural yang memperkuat otoritas pesantren. Kiai mengidentifikasi keterikatan sosial pesantren yang mendalam sebagai faktor pendukung: *"Modal sosial. Mlangi sangat mengakar dalam masyarakat. Modal sosial menjadi sarana untuk memperkenalkan konsep-konsep moderasi dalam Islam sehingga efektif"*. Sementara itu, para santri menunjukkan bahwa struktur disiplin memperkuat otoritas normatif, sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu peserta: *"Jadwal belajarnya cukup ketat, [kita] bisa ditegur (tahdzir) jika melanggar aturan—cukup ketat."*

Batasan yang Diakui dan Ancaman yang Diperdebatkan

Data tersebut juga mengungkapkan bahwa konstruksi otoritas ini tidaklah tanpa perdebatan maupun lengkap. Kiai mengakui adanya celah kelembagaan: *"Belum ada suatu gerakan khusus yang bergerak khusus dalam isu-isu moderasi"*, dan menggambarkan program pemerintah sebagai *"Program KEMENAG= sporadis"*. Para santri juga mencatat adanya kesenjangan antara akses dan minat: *"Akses terhadap buku-buku non-Muslim terlalu tinggi tetapi tidak seimbang dengan keinginan/minat santri yang rendah"*, dan menceritakan sebuah insiden reaksi negatif dari masyarakat: *"pernah ada pawai Idul Fitri di mana salah satu pesantren mengusung tema kostum multi-agama. Karena kejadian itu sehingga dicap jelek oleh masyarakat Mlangi"* Akhirnya, sang Kiai menyebutkan ancaman eksternal yang berada di luar kendali pesantren, dengan menggambarkan *"gerakan-gerakan kanan yang bertindak sebagai main hakim sendiri"* dan *"konflik internal agama"* sebagai ancaman terbesar bagi masa depan moderasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Pesantren Aswaja Nusantara secara diskursif memposisikan otoritas keagamaannya dalam menghadapi disinformasi yang dipicu oleh media, serta bagaimana posisi tersebut membentuk konstruksi moderasi keagamaan di kalangan santrinya. Temuan-temuan ini memberikan jawaban yang jelas, meskipun dengan beberapa syarat: pesantren tersebut tidak sekadar menentang kekacauan media digital melalui isolasi atau larangan, melainkan melalui strategi diskursif aktif yang menegaskan kembali keutamaan pengetahuan berbasis sanad yang dihayati—yang berulang kali disinggung melalui frasa "tangan pertama"—sebagai sesuatu yang secara kategoris lebih unggul daripada sirkulasi informasi yang tidak dimediasi dan tidak terverifikasi (Saepudin and Rohandy 2024; Khasanah et al. 2025; Muliana et al. 2024). Temuan ini memberikan dukungan empiris terhadap pembedaan konseptual, yang diuraikan dalam Tinjauan Pustaka, antara legitimasi keagamaan berbasis sanad dan algoritmik (Siregar et al. 2025; Azka and Awang 2026; Sulfikar and Yasmine 2026). Di mana legitimasi algoritmik semakin mengutamakan daya tarik emosional dan visibilitas platform daripada ketelitian metodologis dan validasi akademis, wacana para kiai dalam studi ini secara eksplisit mendasarkan otoritas pesantren pada logika yang berlawanan: legitimasi melalui transmisi yang terverifikasi, bukan jangkauan atau popularitas (La Harisi et al. 2026). Hal ini menunjukkan bahwa setidaknya sebagian otoritas keagamaan tradisionalis tidak sekadar kehilangan pengaruhnya secara otomatis akibat legitimasi algoritmik, melainkan secara aktif dan sadar membangun klaim legitimasi tandingan yang memanfaatkan tepatnya hal-hal yang tidak dapat ditawarkan oleh otoritas algoritmik—ilmu keagamaan yang dapat diverifikasi dan diturunkan secara langsung dari satu generasi ke generasi berikutnya (Suparmi et al. 2026).

Temuan ini tidak hanya memperluas, tetapi juga memberikan nuansa baru terhadap pemahaman yang sudah ada mengenai otoritas pesantren di era digital. Penelitian sebelumnya

menunjukkan bahwa otoritas kiai tetap bertahan karena pesantren berfungsi sebagai ruang untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya, termasuk pengakuan sosial terhadap kedudukan kiai yang terhormat—suatu penjelasan yang sebagian besar bersifat reproduktif, di mana otoritas tersebut tetap bertahan melalui sikap hormat budaya yang diwariskan (Harnadi et al. 2021a). Temuan-temuan ini mengindikasikan adanya mekanisme yang saling melengkapi namun berbeda: otoritas dipertahankan tidak hanya melalui pengakuan budaya yang diwariskan, tetapi juga melalui perdebatan diskursif yang aktif, di mana pesantren secara eksplisit menyebut dan mendelegitimasi sumber-sumber pengetahuan keagamaan yang bersaing (media yang tidak bertanggung jawab, suara-suara yang kurang kompeten secara keagamaan) alih-alih sekadar mengandalkan sikap hormat yang sudah ada sebelumnya dari para santri (Saepudin and Rohandy 2024; Syafaq et al. 2026; Hayati et al. 2025). Hal ini lebih mendekati apa yang digambarkan oleh kajian akademis terkini sebagai pesantren yang mengembangkan bentuk-bentuk otoritas hibrida yang mengintegrasikan legitimasi keilmuan tradisional dengan keterlibatan digital dan diskursif yang aktif, alih-alih pelestarian otoritas secara statis semata-mata melalui inersia budaya. Jika dibaca secara bersama-sama, temuan-temuan ini menunjukkan bahwa otoritas pesantren di era digital sebaiknya dipahami dalam spektrum yang berkisar dari reproduksi budaya pasif hingga perdebatan diskursif yang aktif, dengan kasus ini lebih mendekati kutub yang terakhir—sebuah nuansa penting yang berisiko terabaikan oleh narasi sederhana mengenai "pelestarian otoritas" (Hendi Sugianto et al. 2025).

Temuan-temuan tersebut juga secara langsung sejalan dengan interpretasi institusional terhadap teori mediatisasi yang diadopsi dalam penelitian ini. Pendekatan institusional terhadap mediatisasi memandang fenomena tersebut sebagai proses dinamis di mana logika-logika lembaga-lembaga tertentu berinteraksi dengan logika-logika media, alih-alih sebagai proses seragam di mana lembaga-lembaga keagamaan menyerahkan pengaruhnya kepada media (Hjarvard 2008; Martino 2013). Strategi Kiai dalam menghadapi "media yang tidak bertanggung jawab" melalui kontak interpersonal dan kelembagaan secara langsung—bukan dengan mengadopsi logika media seperti video pendek atau produksi konten berbasis algoritma, sebagaimana didokumentasikan pada "da'i selebriti" dalam penelitian pesantren Indonesia lainnya—menggambarkan sebuah kasus di mana sebuah lembaga terlibat dalam mediatisasi secara diskursif (dengan menyebut dan mendelegitimasi otoritas media) tanpa harus mengadopsi praktik-praktik mediatisasi itu sendiri (A'lan Tabaika and Roibin 2025). Hal ini merupakan perbedaan yang signifikan secara teoretis dibandingkan dengan kasus-kasus seperti para da'i Islam yang menyusun dan mengelola narasi dakwah mereka secara langsung di platform media digital sebagai bagian dari strategi mereka dalam membangun otoritas, atau dinamika antara selebriti dan da'i yang dijelaskan dalam penelitian mengenai komodifikasi agama di kalangan para da'i Islam Indonesia kontemporer (Raya 2024; Abdurahman et al. 2026; Zaenuri 2026). Di mana, kasus-kasus tersebut menggambarkan bagaimana otoritas dinegosiasikan ulang melalui adopsi media digital, Pesantren Aswaja Nusantara dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana otoritas dinegosiasikan ulang sebagai respons terhadap media digital, terutama melalui penguatan pedagogi tatap muka dan disiplin komunal (sistem tahdzir, pengajaran fiqh yang terstruktur), alih-alih bersaing secara langsung dalam ekonomi perhatian digital.

Hal ini menunjukkan bahwa mediatisasi tidak memaksa adanya satu respons kelembagaan yang konvergen; sebaliknya, lembaga-lembaga tampaknya memilih strategi diskursif atau praktis tergantung pada sumber daya spesifik—modal sosial, struktur disiplin ilmu, dan tradisi keilmuan—yang sudah mereka miliki (Martino 2013; Suparmi et al. 2026). Bukti komparatif dari berbagai pesantren serta studi media keagamaan yang lebih luas menunjukkan adanya spektrum respons—penolakan, adaptasi, progresif, dan hibrida—bukan sekadar pergerakan linier tunggal menuju kesesuaian dengan media. Oleh karena itu, kontribusi utama dari studi kasus ini adalah untuk menunjukkan bahwa otoritas keagamaan di pesantren dapat dinegosiasikan ulang tidak hanya melalui adopsi teknologi digital, tetapi juga melalui perlawanan institusional yang terorganisir dan delegitimasi diskursif terhadap otoritas media (Hefner 2022; Saepudin and Rohandy 2024).

Berpindah ke pertanyaan penelitian kedua, temuan-temuan menunjukkan bahwa konstruksi otoritas ini tidak sekadar bersifat defensif, melainkan juga membentuk isi spesifik dari nilai-nilai moderasi yang ditanamkan kepada para santri. Studi-studi pesantren yang ada secara konsisten menunjukkan bahwa nilai-nilai moderasi ditanamkan melalui otoritas kyai, pengajaran rutin, teladan, dan sosialisasi kelembagaan, bukan hanya melalui pernyataan doktrinal formal (Hendi Sugianto et al. 2025; Rofiq 2025; Hamidah and Chasannudin 2021). Definisi moderasi yang diperluas berdasarkan keadilan oleh Kiai—yakni pengakuan, perwakilan, dan distribusi—tidak disajikan sebagai doktrin yang berdiri sendiri, melainkan sebagai klaim yang memerlukan otoritas keilmuan pesantren untuk melegitimasi penyimpangannya dari definisi yang lebih sempit dan lebih umum yang didasarkan pada toleransi. Kerangka pemikiran tersebut sejalan dengan literatur yang lebih luas yang menunjukkan bahwa wasathiyah bukanlah konsep tunggal yang tetap, melainkan wacana yang diperdebatkan dan sensitif terhadap konteks, yang maknanya ditafsirkan, diperluas, dan disahkan oleh berbagai aktor (Abraar 2025; Tamam et al. 2026).

Hal ini menjawab kesenjangan yang teridentifikasi dalam Tinjauan Pustaka: studi-studi yang ada mengenai moderasi di pesantren sering kali mendokumentasikan bahwa moderasi biasanya ditransmisikan melalui kepemimpinan karismatik atau teladan, namun sering kali tidak sampai secara eksplisit merumuskan teori mengenai bagaimana legitimasi otoritas sebelumnya membuat transmisi tersebut menjadi persuasif (Muntoha et al. 2025), seperti dalam penelitian terkini mengenai bagaimana para kiai melembagakan nilai-nilai wasathiyah melalui pengajaran agama rutin dan teladan) tanpa secara eksplisit mengaitkan transmisi ini dengan upaya legitimasi otoritas yang telah dilakukan sebelumnya. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa proses-proses tersebut tidak bersifat berurutan, melainkan simultan: klaim para kiai mengenai moderasi sebagai keadilan bersifat persuasif bagi para santri, sebagian karena disampaikan melalui sumber yang otoritasnya telah dipastikan secara diskursif melawan klaim-klaim lain yang bersaing dan kurang ketat mengenai kebenaran agama.

Narasi para santri mengenai peralihan dari sikap eksklusif ke sikap terbuka, yang secara konsisten dikaitkan dengan penalaran berbasis fiqh yang berkelanjutan daripada pengajaran moderasi secara langsung, semakin mendukung interpretasi ini: moderasi tampaknya diserap bukan sekadar sebagai konten deklaratif, melainkan lebih sebagai disposisi yang ditumbuhkan melalui kepercayaan terhadap, dan paparan berkelanjutan terhadap, otoritas yang telah ditetapkan sebagai sah.

Pada saat yang sama, temuan ini mengingatkan agar tidak melakukan interpretasi yang terlalu berpusat pada institusi. Baik para kiai maupun santri mengakui bahwa otoritas ini beroperasi di dalam, bukan di atas, batasan-batasan komunitas—sebagaimana digambarkan oleh reaksi sosial yang dihadapi oleh sebuah pesantren tetangga terkait insiden kostum antaragama—dan bahwa ancaman yang lebih luas (komodifikasi politik atas identitas keagamaan, gerakan main hakim sendiri) berada jauh di luar jangkauan diskursif pesantren. Hal ini menyeimbangkan klaim utama penelitian ini: meskipun Pesantren Aswaja Nusantara secara aktif dan efektif membangun otoritas untuk melawan disinformasi media pada tingkat sosialisasi santri, para peserta sendiri tidak menganggap pembangunan ini cukup untuk menjamin masa depan moderasi beragama di tingkat masyarakat, yang menunjukkan adanya kondisi batas bagi teori mediatisasi kelembagaan yang belum ditangani secara memadai oleh penerapan kerangka kerja sebelumnya—yang sebagian besar berfokus pada dinamika individu-lembaga: pembentukan otoritas institusional mungkin berhasil secara internal namun tetap tidak memadai secara struktural dalam menghadapi ancaman eksternal pada tingkat makro.

Penutup

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pesantren tradisionalis di Indonesia secara diskursif membangun otoritas keagamaan sebagai respons terhadap disinformasi yang disebarkan media, serta bagaimana konstruksi tersebut membentuk isi pesan moderasi keagamaan

yang disampaikan kepada para santri. Selain menegaskan bahwa otoritas pesantren tetap bertahan di era digital, temuan ini mengungkap sesuatu yang tidak terlalu diantisipasi pada awalnya: alih-alih mengikuti tren umum di mana otoritas keagamaan Indonesia memanfaatkan platform digital untuk bersaing mendapatkan visibilitas, Pesantren Aswaja Nusantara justru memperkuat otoritasnya dengan menolak tren tersebut—dengan semakin mengedepankan pedagogi tatap muka, struktur disiplin, dan garis keturunan keilmuan sebagai klaim legitimasi alternatifnya, alih-alih memasuki ekonomi perhatian sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh platform digital. Sama tak terduganya adalah keterkaitan erat antara konstruksi otoritas dan isi substantif moderasi: redefinisi moderasi oleh para Kiai sebagai keadilan (pengakuan, representasi, distribusi) bukan sekadar konten doktrinal yang ditumpangkan di atas otoritas yang sudah mapan, melainkan tampak tak terpisahkan dari upaya legitimasi otoritas itu sendiri—para santri menerima definisi moderasi yang luar biasa luas ini sebagian karena definisi tersebut datang dari sumber yang sudah dianggap lebih dapat dipercaya daripada "media yang tidak bertanggung jawab." Keterkaitan ini antara cara otoritas diklaim dan makna moderasi yang terbentuk merupakan dinamika yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur mediatisasi dan otoritas pesantren yang ada, yang cenderung memperlakukan otoritas. Keterkaitan antara cara klaim otoritas dan makna moderasi ini merupakan dinamika yang belum diuraikan secara bersama-sama dalam literatur mediatisasi dan otoritas pesantren yang ada, yang cenderung memperlakukan pelestarian otoritas dan penyebaran moderasi sebagai objek analisis yang terpisah.

Meskipun demikian, kontribusi-kontribusi ini harus dibaca dengan mempertimbangkan keterbatasan penelitian ini. Sebagai studi kasus di satu lokasi yang mengandalkan satu wawancara dengan seorang kiai dan satu kelompok fokus santri, temuan ini tidak dapat digeneralisasikan secara statistik, dan penelitian ini tidak dapat menentukan apakah strategi diskursif yang diidentifikasi di sini—otoritas melalui penolakan konvergensi digital—mewakili ciri khas sejarah khusus Pesantren Aswaja Nusantara dan keterikatan sosialnya di Mlangi, atau pola yang lebih luas di kalangan pesantren tradisionalis yang berafiliasi dengan NU secara umum. Desain penelitian cross-sectional ini juga tidak dapat menentukan apakah pergeseran yang dilaporkan oleh para santri menuju keterbukaan mencerminkan perubahan sikap yang bertahan lama atau narasi yang diinginkan secara sosial yang ditawarkan di dalam lingkungan pesantren itu sendiri.

Keterbatasan-keterbatasan ini mengarah pada arahan konkret bagi penelitian di masa depan. Diperlukan studi komparatif di berbagai lokasi untuk menguji apakah strategi "otoritas melalui penolakan" yang diidentifikasi di sini juga terjadi di pesantren-pesantren tradisionalis lainnya, atau apakah strategi tersebut secara sistematis berbeda dari pesantren yang justru mengupayakan konvergensi digital—penelitian yang akan memungkinkan teori mediatisasi beralih dari deskripsi kasus tunggal menuju tipologi respons kelembagaan terhadap gangguan media keagamaan. Desain penelitian longitudinal yang mengikuti santri setelah masa tinggal mereka di pesantren berakhir akan membantu menentukan apakah moderasi yang diserap melalui pedagogi berbasis fiqh tetap bertahan setelah santri tidak lagi berada dalam struktur disiplin dan sosial pesantren, sehingga mengatasi keterbatasan penelitian ini dalam menganalisis keberlanjutan. Terakhir, mengingat baik kiai maupun santri dalam penelitian ini mengidentifikasi ancaman tingkat makro—komodifikasi politik identitas keagamaan, gerakan main hakim sendiri—sebagai hal yang berada di luar jangkauan diskursif pesantren, penelitian di masa depan dapat secara produktif memperluas kerangka mediatisasi agama melampaui hubungan institusi-audiens yang diteliti di sini untuk merumuskan teori tentang bagaimana konstruksi otoritas institusional berinteraksi dengan, dan dibatasi oleh, aktor negara serta aktor politik-ekonomi yang beroperasi pada skala yang tidak dapat dilawan secara diskursif oleh pesantren mana pun secara individual

Penelitian ini menunjukkan bahwa masa depan moderasi keagamaan di Indonesia mungkin tidak terlalu bergantung pada apakah lembaga-lembaga tradisionalis mampu mengungguli media digital dalam kerangka yang ditetapkan oleh media itu sendiri, melainkan lebih bergantung pada apakah model otoritas alternatif mereka yang berbasis hubungan dapat dipertahankan dan

diperluas tanpa kehilangan kualitas-kualitas—inkarnasi, verifikasi, dan akuntabilitas komunal—yang membedakannya dari logika media yang mereka lawan.

Referensi

Abdurahman, Isrun, Rohman Pranoto, Agus Salim, Rizaldy Alpiansyah, and Irfan Alkhotiri. 2026. "Crisis Of Authority In Islamic Educational Institutions: Strategic Response Of Islamic Education Management To The Shift In Generation Z's Trust In The Digital Era." *Labina : Journal of Islamic Education Management*, ahead of print, March 31. https://doi.org/10.66891/hn04ay64.

Abdushomad, Muhammad Makmun Rasyid and Muhammad Adib. 2025. "Navigating Religious Harmony in the Age of Social Media - Academia." The Jakarta Post, July 4. https://www.thejakartapost.com/opinion/2025/07/04/navigating-religious-harmony-in-the-age-of-social-media.

Abraar, M. 2025. "ISLAM WARNA-WARNI MENAFSIR ULANG KONSEP UMMATAN WASATHAN." *NIHAYAH: Journal of Islamic Studies*, ahead of print, August 16. https://doi.org/10.65802/nihayah.v1i2.41.

Adlan, Muhamad Aqim. 2023. "Cooperation Dilemma: Between Islamic Values and Digitalization." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 34 (1): 61–78. https://doi.org/10.33367/tribakti.v34i1.3144.

Afida, R., Siti Aimah, and Bannaga Hussen. 2024. "Building Harmony in Diversity: Pesantren Strategies to Resolve Cultural Conflicts in Non-Muslim Communities." *Journal of Islamic Education Research*, ahead of print, December 2. https://doi.org/10.35719/jier.v5i3.453.

A'lan Tabaika, Mokhammad, and Roibin Roibin. 2025. "DIGITAL DAWAH AND THE RECONSTRUCTION OF ISLAMIC AUTHORITY." *Al-Balagh : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 10 (2). https://doi.org/10.22515/albalagh.v10i2.12116.

Azka, Kamil, and A. Awang. 2026. "THE SCIENTIFIC AUTHORITY OF ULAMA IN THE ERA OF SOCIAL MEDIA ALGORITHMS AND THE SHIFT IN THE LEGITIMACY OF ISLAMIC FATWAS." *NIHAYAH: Journal of Islamic Studies*, ahead of print, April 29. https://doi.org/10.65802/nihayah.v2i1.121.

Campbell, Heidi A., and Ruth Tsuria. 2021. *Digital Religion: Understanding Religious Practice in Digital Media*. 2nd ed. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429295683.

Didin, Didin, Tohirin Tohirin, Basirin Basirin, and S. Sumadi. 2026. "The Authority of Knowledge and Teacher-Student Relations: An Epistemological Analysis of Islamic Education Based on Kitab Kuning." *ALSYS*, ahead of print, January 30. https://doi.org/10.58578/alsys.v6i1.8987.

Hamidah, Kamilia, and Arif Chasannudin. 2021. *Mechanization of Islamic Moderation Da'wah in the Nahdlatul Ulama Pesantren Tradition*. June 30. https://doi.org/10.21580/jid.v41.1.7134.

Hannan, Abd, and Ach. Fatayillah Mursyidi. 2023. "Social Media and the Fragmentation of Religious Authority among Muslims in Contemporary Indonesia." *Digital Muslim Review*, ahead of print, November 21. https://doi.org/10.32678/dmr.v1i2.10.

Harnadi, Dodik, Hotman Siahaan, and M. Hilmy. 2021a. *Pesantren and the Preservation of Traditional Religious Authority in the Digital Age*. June 22. https://doi.org/10.20473/mkp.v34i32021.272-280.

Harnadi, Dodik, Hotman Siahaan, and Masdar Hilmy. 2021b. "Pesantren and the Preservation of Traditional Religious Authority in the Digital Age." *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 34 (3): 272. https://doi.org/10.20473/mkp.V34I32021.272-280.

Harto, Jemmy. 2026. "Sejarah Sanad Ilmu Al-Qur'an Di Kalangan Ulama Minangkabau Dan Perannya Sebagai Basis Epistemologi Pendidikan Islam." *Tarikh : Journal of Islamic History and Civilization*, ahead of print, April 30. https://doi.org/10.61630/tjihc.v2i1.30.

Hayati, Bridav, M. Alawy Farhan, Yahya, et al. 2025. "Kredibilitas Dakwah Dalam Ruang Publik Digital Berbasis Algoritma Studi Penguatan Literasi Digital Bagi Da'i Dan Masyarakat." *Ashfiya Journal of Qualitative Insight in Islamic Studies*, ahead of print, December 19. https://doi.org/10.65729/ashfiya.v1i2.359.

Hefner, Claire-Marie. 2022. "Morality, Religious Authority, and the Digital Edge: Indonesian Muslim Schoolgirls Online." *American Ethnologist* 49 (3): 359–73. https://doi.org/10.1111/amet.13088.

Hendi Sugianto, Rofiqi Rofiqi, and Zainuddin Zainuddin. 2025. "Charismatic Leadership And Digital Resilience: How Kyai Navigate Religious Moderation In Contemporary Indonesian Pesantren." *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1 (2): 101–10. https://doi.org/10.32806/jspai.v1i2.1464.

Hidayati, Nurul. 2025. "Qurʾanic Scholarly Authority Within Pesantren Networks in Indonesia: A Genealogical Reading of the Sanad of KH Munawwar Sidayu, Gresik." *QOF*, ahead of print, June 30. https://doi.org/10.30762/qof.v9i1.2850.

Hjarvard, Stig. 2008. "The Mediatization of Religion: A Theory of the Media as Agents of Religious Change." *Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook* 6 (1): 9–26. https://doi.org/10.1386/nl.6.1.9/1.

Ichwan, M., D. Ming, and M. Sya'roni. 2025. "Bridging Tradition and Modernity: Integrating Classical Interpretation and Modern Hermeneutics through Ijtihad in Qur'an Studies." *Pharos Journal of Theology*, ahead of print, March 1. https://doi.org/10.46222/pharosjot.106.2021.

Khasanah, Mita Nur, Akbar Yusgiantara, and Rustam Ibrahim. 2025. "Model Pembelajaran Bersanad Sebagai Strategi Peningkatan Pengetahuan Di Pesantren." *ANWARUL*, ahead of print, November 24. https://doi.org/10.58578/anwarul.v5i6.8035.

kumparan. 2024. "BNPT: Selama 2023-2024 Tak Ada Serangan Teroris, tapi Banyak Remaja Intoleran." June 10. https://kumparan.com/kumparannews/bnpt-selama-2023-2024-tak-ada-serangan-teroris-tapi-banyak-remaja-intoleran-22uWe6dxvaj.

La Harisi, Isnain, Marwan Mas'ud, A. Imran, and M. Amien. 2026. "Algorithms, Religious Authority, and Digital Da'wah: A Qualitative Study of Social Media in Indonesia." *Journal of Mathematics Instruction, Social Research and Opinion*, ahead of print, April 1. https://doi.org/10.58421/misro.v5i1.1322.

Lubis, Nikmah. 2023. "Intersection of Traditional Religious Authority and New Authority in the Digital Space of Indonesia." *FIKRAH* 11 (1): 135. https://doi.org/10.21043/fikrah.v11i1.19678.

Martino, Luís Mauro Sá. 2013. *The Mediatization of Religion: When Faith Rocks*. Ashgate Publishing Company.

Muhammad Latif Fauzi, Imam Mustofa, Ibnu Akbar Maliki, and Faiz Husaini. 2026. "The Digital Minbar: Repositioning Religious Authority and the Dynamics of Islamic Law in Contemporary Egypt's Virtual Landscape." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 5 (1): 178–209. https://doi.org/10.32332/milrev.v5i1.11109.

Mukhibat, M., Mukhlison Effendi, Wawan Herry Setyawan, and M. Sutoyo. 2024. "Development and Evaluation of Religious Moderation Education Curriculum at Higher Education in Indonesia." *Cogent Education* 11 (1): 2302308. https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2302308.

Muliana, Siti, Mad Yahya, and Taaibah Ngaunillah Rohmatun. 2024. "The Scientific Sanad Tradition of Islamic Boarding Schools as a Basis for Strengthening Moderate Religion in the Post-Truth Era." *IJIBS* 2 (1): 1–12. https://doi.org/10.35719/ijibs.v2i1.29.

Muntoha, Tohir, I. Kholid, S. Subandi, and Rumadani Sagala. 2025. "Kyai Leadership in Promoting Religious Moderation: A Case Study in Indonesian Pesantren." *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, ahead of print, December 29. https://doi.org/10.35445/alishlah.v17i4.7642.

Mustaghfirin, M., and Ghalby Nur Muhammad. 2021. "Transmisi Dan Kontribusi Dalam Jaringan Sanad Syekh Yasin Padang." *Refleksi*, ahead of print, November 3. https://doi.org/10.15408/ref.v20i1.19763.

Najiha, Rina. 2025. "Agama Dan Kemajuan Teknologi Digital: Digital Religion Dan Media Sosial." *Mozaic: Islamic Studies Journal* 4 (02). https://doi.org/10.35719/mozaic.v4i02.2299.

Negara, Balqis Najma, Maula Devina Yahya, and Purnomo Purnomo. 2025. "The Role of Pesantren Edii Mancoro in Strengthening Religious Moderation." *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam*, ahead of print, December 8. https://doi.org/10.51468/jpi.v7i2.1054.

Rahman, Fazlul. 2015. "Internet and Kyais in Indonesia: Negotiation of Authority in a Mediatized Environment." *Online - Heidelberg Journal of Religions on the Internet*, ahead of print. https://doi.org/10.11588/REL.2015.0.26252.

Raya, Moch. Khafidz Fuad. 2024. "Digital Islam: New Space for Authority and Religious Commodification among Islamic Preachers in Contemporary Indonesia." *Contemporary Islam* 19 (October): 161–94. https://doi.org/10.1007/s11562-024-00570-z.

Rofiq, Ainur. 2025. "Kiai as Socialization Agents: Shaping Santri Identity to Foster Tolerance in the Context of Diversity." *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, ahead of print, December 30. https://doi.org/10.31538/tijie.v6i4.2894.

Rois, Choirur, and Gholamreza Yazdani. 2026. "Digital Schism: The Reconstruction of Religious Authority and the Emergence of Islamic Knowledge Elite in the AI Era." *Surau Journal of Islamic Studies*, ahead of print, January 3. https://doi.org/10.63919/surau.v2i1.65.

Rosowulan, Titis, Ahmad Fuad Hasyim, Muhammad Sholikhun, et al. 2025. "Pesantren's Knowledge Identity Crisis in the Digital Era." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 13 (1): 49–76. https://doi.org/10.26811/peuradeun.v13i1.1287.

Saepudin, Ahmad, and Fajar Rohandy. 2024. "Islamic Tradition and Digital Resistance: Constructing Moderate Religious Habitus in Indonesian Pesantren Salaf." *Tashwirul Afkar* 43 (1): 49–70. https://doi.org/10.51716/ta.v43i1.647.

Setara Institute Catat 329 Pelanggaran KBB Sepanjang 2023 - Setara. 2024. June 24. https://setara-institute.org/media_setara/setara-institute-catat-329-pelanggaran-kbb-sepanjang-2023/.

Setianto, Yearry Panji. 2026. "Mediatization of Indonesian Islam: A Historical Examination of Media and Religious Change." *Religions*, ahead of print, January 30. https://doi.org/10.3390/rel17020170.

Setiawan, Asep Iwan, Yusuf Zaenal Abidin, Ridwan Rustandi, Ahmad Sarbini, and Rohmanur Aziz. 2026. "Transforming Religious Education Through Inclusivity: How Indonesian Pesantren Cultivate Moderate Islamic Values and Da'wah Practices." *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, ahead of print, January 1. https://doi.org/10.31538/nzh.v9i1.406.

Siregar, Kombang Tua, Ilyas Zhakypkazy, and Badrah Uyuni. 2025. "Indonesian Muballigh and Religious Authority: From Sanad to Algorithmic Transformation of Islamic Knowledge Transmission in the Digital Era." *JURNAL INDO-ISLAMIKA*, ahead of print, December 26. https://doi.org/10.15408/jii.v15i2.47052.

Solahudin, Dindin, and M. Fakhruroji. 2019. "Internet and Islamic Learning Practices in Indonesia: Social Media, Religious Populism, and Religious Authority." *Religions*, ahead of print, December 31. https://doi.org/10.3390/rel11010019.

Sugihartati, Rahma, Bagong Suyanto, and Medhy Aginta Hidayat. 2020. "CHANNELIZATION STRATEGIES OF RADICALISM AMONG MUSLIM UNIVERSITY STUDENTS IN INDONESIA." *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 14 (2): 309. https://doi.org/10.15642/JIIS.2020.14.2.309-334.

Sulfikar, Achmad, and Daisy Indira Yasmine. 2026. "PLATFORMIZED RELIGIOUS AUTHORITY: Rethinking Legitimacy in the Age of Social Media Influencers." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 20 (02): 141–71. https://doi.org/10.21274/epis.2025.20.02.141-171.

Sulthon, Muhammad, M. Musthofa, and Mishbah Khoiruddin Zuhri. 2025. "Decentering Islamic Authority in The Digital Sphere: Gus Baha's Al-Hikam and The Reconfiguration of Vernacular Sufism in Indonesia." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, ahead of print, July 31. https://doi.org/10.33367/tribakti.v36i2.7108.

Suparmi, Siti Asmonah, and M. Hilmy. 2026. "Digitalizing Tradition: State Power, Religious Authority, and the Reconfiguration of Pesantren Identity in Indonesia's Society 5.0 Era." *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, ahead of print, June 6. https://doi.org/10.53515/alqodiri.v24i2.126.

Syafaq, Hammis, Nur Lailatul Musyafa'ah, Ahmad Hasan Al Banna, and Umi Rosyidah. 2026. "' *Santri* without *Pesantren* ' and the Sectarian Violence on Indonesian Muslim Social Media." *Cogent Arts & Humanities* 13 (1): 2612046. https://doi.org/10.1080/23311983.2025.2612046.

Syarifuddin, Ahmad Ihsan. 2026. "From Sanad to Algorithms: The Transformation of Islamic Authority and the Reconstruction of Nusantara Islamic Epistemology in the Digital Age." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, ahead of print, March 11. https://doi.org/10.69900/ag.v6i2.577.

Tamam, Asep, Adi Supardi, Mohamad Erihadiana, and Dadan Mardani. 2026. "The Harmonization of Wasathiyatul Islam: Transforming Values of Religious Moderation in the Dialectics of Indonesian Society." *International Journal of Islamic Educational Research*, ahead of print, January 21. https://doi.org/10.61132/ijier.v3i1.491.

Ubaidillah, Ubaidillah, and Muhammad Fauzinudin Faiz. 2025. "Beyond the Sacred Walls: Reimagining Pesantren's Architecture of Islamic Moderation." *Ulumuna*, ahead of print, June 15. https://doi.org/10.20414/ujis.v29i1.1362.

'Ulyan, Mohammad. 2023. "Digital Da'wah and Religious Authority: A Narrative Review of Islamic Preaching in the Social Media Era." *Sinergi International Journal of Islamic Studies* 1 (3): 100–113. https://doi.org/10.61194/ijis.v1i3.591.

Whyte, S. 2022. "Islamic Religious Authority in Cyberspace: A Qualitative Study of Muslim Religious Actors in Australia." *Religions*, ahead of print, January 12. https://doi.org/10.3390/rel13010069.

Zabieno, Anggeline Saviola, Damayanti Damayanti, and Ahmad Zakki Abdullah. 2025. "The Role of AI, Filter Bubbles, and Echo Chambers in Political and Religious Polarization on Social Media." *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, ahead of print, November 18. https://doi.org/10.21274/dinamika.2025.25.2.102-118.

Zaenuri, L. 2026. "Celebrity Preachers and The Commodification of Da'wah: A Comparative Study of Traditional Ulama Versus Influencer Hijrah in Indonesia." *Al-Munawwarah : Jurnal Pendidikan Islam*, ahead of print, March 26. https://doi.org/10.35964/almunawwarah.v18i1.544.

Zayyadi, Ahmad, Zainol Hasan, and Kasrim Kasrim. 2025. "Contesting Religious Authority in the Post-Truth Era through a Case Study of Fatwas Issued by the Indonesian Ulema Council and Online Preachers." *West Science Islamic Studies*, ahead of print, October 31. https://doi.org/10.58812/wsiss.v3i04.2344.